

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

1. Dalam DPRD (Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah) di Kabupaten Bantul itu didalamnya memiliki lembaga yang dilaksanakan terdapat bermacam Partai Politik dan lembaga-lebaga tersebut mempunyai tugas masing-masing untuk melakukan pelaksanaan Pengawasannya. Yang diawasi oleh DPRD Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, dan cara Pengawasannya melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) semacam rapat koordantra komisi-komisi DPRD dengan dinas atau instansi mitra kerjanya secara kontinu antara Alkap (Alat Kelengkapan) dengan SKPD (Satuan Kerja Rapat Daerah), dan selanjutnya melakukan inpeksi mendadak dari komisi-komisi kedinas atau instansi yang terkait dan di butuh kan laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD.

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul, melaksanakan dana yang digunakan untuk melakukan kajian dan menyusun RAB (Rencana

Anggaran Biaya) Pelaksanaan APBD tersebut meliputi

pembiayaan kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

b. Saran

1. DPRD Kabupaten Bantul seharusnya lebih bisa mengoptimalkan untuk melaksanakan Pengawasan, khususnya di Daerah Kabupaten Bantul biar masyarakat Bantul menjadi lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas berpihak pada rakyatnya dan mendorong Bantul kesejahteraan demokratis dan agamis.
2. Pengawasan DPRD Bantul lebih di optimalkan lagi untuk menghilangkan kendala keterbatasan, kurangnya pengalaman, sarana dan DPRD Kabupaten Bantul melakukan komunikasi atau bersikap lebih tegas lagi untuk melakukan Raperda biar semua anggaran yang tidak transparan itu menjadi lebih terbuka. Karena ini sangat penting untuk melakukan

3. Kinerja DPRD semoga lebih baik dari sebelumnya. Di priode kali ini bisa melaksanakan proses Legislasi dengan Raperda Inisiatif. lebih banyak lagi inisiasi dari Dewan bukan hanya Raperda namun berbagi dukungan yang mengarah bagi kebijakan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan